

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang berisi informasi keuangan suatu badan usaha yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan harus disajikan seragam dan sesuai ketentuan yang berlaku agar pihak internal maupun eksternal dapat mencapai kepentingan mereka.

Para akuntan yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan standar untuk penyusunan laporan keuangan di Indonesia dengan nama Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun era globalisasi berdampak pada tidak adanya batasan bagi satu negara dengan negara lain. Laporan keuangan perusahaan pun pada akhirnya dituntut agar lebih transparan. Era ini membuat para ahli berusaha secara berkesinambungan agar laporan keuangan yang disajikan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat mengikuti perkembangan standar internasional. Hal ini bisa dibuktikan dengan sudah dilakukannya proses revisi untuk SAK sebanyak enam kali (www.iaiglobal.or.id).

Selain itu, globalisasi juga membuat masalah perekonomian kian meruncing. Permasalahan tersebut membawa dampak buruk terhadap

pembangunan nasional. Pemerintah harus dengan sigap menanggapi masalah-masalah tersebut, salah satunya adalah di sektor penerimaan negara. Penerimaan negara yang dahulu berasal dari sektor migas, sekarang beralih ke sektor perpajakan. Berikut adalah gambaran penerimaan negara dalam lima tahun terakhir (2007-2011)

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara

Penghasilan	2007	2008	2009	2010	2011
Pajak	490,988	658,701	691,922	723,307	878,685
Non-Pajak	215,120	320,604	227,174	268,942	286,568
Jumlah	706,108	979,305	847,096	992,249	1,165,253

Sumber : Badan Pusat Statistik melalui Departemen Keuangan

Berdasarkan data di atas, dalam lima tahun terakhir lebih dari 67% penerimaan negara diperoleh dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Bahkan pada tahun 2011, negara berhasil memperoleh pembayaran pajak sebesar 75% dari Rp 1,165,253 milyar. Oleh karena itu, agar pembangunan nasional tidak terhambat, pemerintah harus segera tanggap terhadap permasalahan penerimaan negara yaitu dari sektor perpajakan.

Masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam sektor perpajakan adalah ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. masyarakat selalu berusaha untuk meminimalisasikan beban pajak yang dibayarkan ke negara. Dengan sistem pemungutan pajak *self assessment* yang dianut Indonesia, para wajib pajak menggunakan berbagai macam cara untuk mengelabui pemerintah dalam hal tersebut. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memanipulasi laporan keuangan agar pajak penghasilan yang disetor ke negara menjadi minim.

Dalam salah satu jenis laporan keuangan yaitu laporan laba rugi, disajikan laba perusahaan yang diperoleh dari jumlah penghasilan yang diperoleh dikurangi dengan jumlah beban yang harus dikeluarkan perusahaan. Laba komersial ini berhubungan erat dengan pajak penghasilan yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara. Pada praktiknya, laba yang sudah dihitung perusahaan akan dibuat seminim mungkin agar pajak penghasilan menjadi kecil. Namun ketika dilakukan perhitungan kembali oleh para petugas pajak akan ditemukan perbedaan. Perhitungan ini memicu munculnya jumlah laba baru yaitu sering disebut dengan laba fiskal. Perbedaan kedua laba ini berujung pada perbedaan jumlah pajak penghasilan (PPh) yang diperoleh menurut laba komersial dengan jumlah PPh terutang menurut SPT.

Laba komersial dan laba fiskal yang berbeda disebabkan oleh perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut SAK dengan UU Perpajakan. Perbedaan-perbedaan ini dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara. Untuk menjembatani kedua laba tersebut, IAI menerbitkan PSAK No.46 yang mengatur akuntansi untuk perhitungan pajak penghasilan. Menurut Agoes & Estralita Trisnawati (2010 : 244), penerapan PSAK No.46 untuk memenuhi tuntutan dalam memasuki era globalisasi agar laporan keuangan yang disajikan perusahaan Indonesia yang digunakan di dalam negeri maupun di luar negeri dapat sejalan dengan perkembangan standar internasional.

PSAK No.46 mengharuskan perusahaan untuk menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan dengan menggunakan *balance sheet liability method*

atau *asset/liability method*. Untuk dapat menghitung dan mengakui pajak tangguhan berdasarkan *balance sheet liability method* sebagaimana di adopsi oleh PSAK No. 46, maka hal utama yg perlu dipahami adalah konsep tentang beda waktu atau sementara.

PT. Kabelindo Murni Tbk. (KBLM) merupakan salah satu perusahaan industri pembuatan kabel. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan, PT Kabelindo berhasil meraih omset Rp 855 milyar. Tidak heran bila perusahaan ini merupakan salah satu dari perusahaan industri pembuatan kabel terbesar di Indonesia. Hal yang menarik dari perusahaan ini adalah besarnya aset tetap yang dimiliki. Aset tetap menyumbangkan angka terbesar untuk aset yang dimiliki perusahaan yaitu Rp 248 milyar dari Rp 642 milyar total aset. Dengan angka aset tetap yang tergolong sangat besar akan berpengaruh pada beban penyusutan yang besar pula. Diperkirakan hal ini berujung mempengaruhi perhitungan pajak tangguhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Konsep Pajak Tangguhan Menurut PSAK No.46 Pada PT. Kabelindo Murni Tbk**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka batasan masalah penelitian ini adalah menganalisis apakah aset dan kewajiban pajak tangguhan

yang sudah dihitung PT. Kabelindo Murni Tbk. pada tahun 2011 sesuai dengan PSAK No.46.

Selain itu, dapat juga dirumuskan berbagai masalah antara lain :

- 1) Bagaimana perhitungan, pencatatan, dan penyajian pajak tangguhan PT. Kabelindo Murni Tbk. tahun 2011?
- 2) Apakah penerapan pajak tangguhan yang dilakukan oleh PT. Kabelindo Murni Tbk. pada tahun 2011 sudah sesuai PSAK No.46?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui cara perhitungan, pencatatan, dan penyajian pajak tangguhan PT. Kabelindo Murni Tbk. tahun 2011
- 1.3.2 Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pajak tangguhan PT. Kabelindo Murni Tbk. pada tahun 2011 terhadap PSAK No.46

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu :

1.4.1 Bagi perusahaan

Perusahaan dapat mengetahui kesesuaian pelaporan pajak tangguhan terhadap peraturan yang berlaku, khususnya PSAK No.46. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi saran dan masukan bagi perusahaan

dalam menerapkan konsep pajak tangguhan agar sesuai dengan ketentuan.

1.4.2 Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi para pembaca tentang bagaimana penerapan konsep pajak tangguhan agar sesuai dengan PSAK No.46

1.4.3 Bagi penulis

Penelitian ini membuat penulis untuk dapat menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan pada dunia kerja. Selain itu penelitian ini juga membantu penulis untuk lebih memahami PSAK No.46 dan penerapan pajak tangguhan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menggambarkan secara umum mengenai isi dari penulisan skripsi ini.

Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

1.5.1 Bab I : Pendahuluan

Bab yang berisi tentang hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, masalah-masalah yang akan diteliti, tujuan maupun manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan.

1.5.2 Bab II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Untuk penelitian ini teori yang berhubungan seperti isi PSAK

No.46, laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal, pajak penghasilan, pajak tangguhan, beda waktu, beda tetap, dll

1.5.3 Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan gambaran umum perusahaan yaitu sejarah perusahaan, struktur organisasi, ikhtisar keuangan, dan lain-lain. Selain itu pada bab ini juga membahas tahapan studi kasus, teknik pengambilan data, dan teknik analisis.

1.5.4 Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang cara perhitungan, pengakuan, dan penyajian pajak tangguhan yang diterapkan perusahaan. Selain itu dalam bab ini juga terdapat data penerapan pajak tangguhan apakah sesuai dengan PSAK No.46

1.5.5 Bab V : Simpulan dan Saran

Pada bab V ini terdapat kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga terdapat saran-saran dari penulis berdasarkan kesimpulan yang sudah diperoleh.